

Katalog BPS : 1413.7371

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA MAKASSAR 2010



Badan Pusat Statistik Kota Makassar
Tahun Anggaran 2011

Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar

2010

Katalog BPS : 1413.7371

Naskah/Editor : Seksi Neraca Wilayah & Analisis Statistik

Gambaran Kulit : Seksi Neraca Wilayah & Analisis Statistik

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

S A M B U T A N

Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia pembangunan yang dilakukan lebih diprioritaskan pada pembangunan manusia itu sendiri.

Publikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data statistik untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia atau kinerja pembangunan manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data ini juga dapat digunakan sebagai perencanaan, evaluasi dan penentuan kebijakan pembangunan daerah.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar tahun 2010 ini merupakan publikasi yang diterbitkan atas kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini BAPPEDA Kota Makassar dengan Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat terbit diucapkan banyak terima kasih.

Makassar, September 2011
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Makassar
Kepala

DRS. H. M. IDRIS PATARAI, M.Si
NIP: 195712311988031052



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Penerbitan publikasi Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar tahun 2010 perlu disyukuri, mengingat data tersebut dibutuhkan untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pemabangunan.

Terbitnya publikasi ini berkat adanya kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Bappeda Kota Makassar dengan BPS Kota Makassar.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat diterbitkan diucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik yang sifatnya membangun kami harapkan untuk perbaikan penerbitan publikasi yang akan datang.

Makassar, September 2011
Badan Pusat Statistik
Kota Makassar
Kepala

H. ABD. HARIS, SE
Nip. 196612311993011001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	2
1.3. Sistematika Pembahasan	2
BAB II. METODOLOGI	5
2.1. Konsep dan Defenisi Indeks Pembangunan Manusia	6
2.1.1. Angka Harapan Hidup	8
2.1.2. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah	9
2.1.3. Purchating Power Parity	10
2.2. Sumber Data	11
BAB III GAMBARAN UMUM	12
3.1. Letak Geografis	12
3.2. Kependudukan	12
3.3. Ekonomi (PDRB)	15
BAB IV POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA	17
4.1. Komponen-Komponen IPM	18

4.1.1. Indeks Kesehatan	18
4.1.2. Indeks Pendidikan	18
4.1.3. Indeks Paritas Daya Beli	19
4.2. Indeks Pembangunan Manusia	20
BAB V KESEHATAN	22
5.1. Angka Harapan Hidup	22
5.2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan	23
5.3. Status Kesehatan Masyarakat	24
BAB VI PENDIDIKAN	26
6.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan	26
6.2. Tingkat Pendidikan	28
6.2.1. Angka Melek Huruf	28
6.2.2. Rata-rata lama sekolah	29
6.2.3. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	29
6.3. Tingkat Partisipasi Sokolah	31
LAMPIRAN TABEL	32
.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memajukan suatu wilayah pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh perlu dilakukan, sehingga hasil dari pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup, karena dimensi manusia dalam pembangunan merupakan tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Kejadian ini muncul sebagai akibat dari tujuan pembangunan yang dinilai kurang berorientasi pada pembangunan manusia dan hak-hak azasinya.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada peningkatan produksi (*production centered development*) dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup karena pertumbuhan ekonomi bukanlah akhir dari tujuan pembangunan, tetapi hanya sebagai alat/cara untuk mencapai tujuan yang lebih esensial yaitu *human security*. Dalam kerangka pemikiran ini manusia tidak ditempatkan sebagai faktor variabel, tetapi hanya sebagai faktor produksi. Dengan berjalannya waktu, paradigma pemikiran pembangunan bergeser dengan lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya muncul lagi paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*) dan memasuki

tahun 90-an paradigma pembangunan lebih terpusat pada aspek manusia (*human centered development*).

Berubahnya kebijaksanaan dalam pembangunan menyebabkan pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada harus disesuaikan. Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat, sering menuntut adanya ukuran baku. Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep "*basic need development*". Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*), yang memiliki tiga parameter yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat melek huruf.

Kemudian dengan muncul dan berkembangnya paradigma baru pembangunan manusia, sejak tahun 1990 UNDP menggunakan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index (HDI)* untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah.

Oleh karena itu, untuk mengukur seberapa besar keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia di Kota Makassar, maka dalam publikasi ini akan disajikan angka-angka dari setiap komponen yang membentuk angka IPM Kota Makassar.

1.2. Tujuan Penulisan.

Penyusunan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar tahun 2010 ini, sebagai kerangka untuk menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan. Publikasi ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi tentang indikator pengukuran pencapaian keberhasilan pembangunan, terutama yang terkait erat dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Disamping itu, angka IPM berfungsi sebagai input dalam penyusunan pola dasar dan rencana pembangunan daerah, sehingga prioritas perencanaan pembangunan lebih terarah. .

Terbitnya publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar tahun 2010 ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum kinerja pembangunan Kota Makassar tahun 2010.

1.3. Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu bab satu menguraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Kemudian bab dua membahas tentang metodologi, yang meliputi pengertian konsep, metode yang digunakan dan penjelasan komponen-komponen dan cara penghitungan indeks masing-masing komponen serta sumber data yang digunakan. Bab tiga membahas mengenai gambaran umum Kota Makassar yang diuraikan atas letak

geografis, kependudukan, ekonomi (PDRB). Kemudian bab empat membahas mengenai posisi pembangunan manusia yang meliputi; Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Paritas Daya Beli serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bab lima membahas masalah kesehatan yang meliputi; angka harapan hidup, pelayanan kesehatan, dan status kesehatan masyarakat. Bab enam membahas mengenai pendidikan yang meliputi; sarana dan prasarana pendidikan, tingkat pendidikan yang ditamatkan serta partisipasi sekolah.

<http://makassarkota.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah sering menuntut adanya ukuran baku dengan menyusun indeks agregat yang memungkinkan diturunkannya satu angka yang merangkum berbagai dimensi masalah yang sedang menjadi topik bahasan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai masyarakat secara cepat adalah indikator komposit. Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator tersebut digunakan dalam perspektif yang berbeda, dan dalam penyajian laporan ini secara khusus hanya menyajikan IPM.

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kuantitatif, selalu di mulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak diukur. Maka dalam laporan ini disajikan konsep dan definisi dari beberapa indikator yang digunakan serta sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan buku ini.

2.1. Konsep dan Definisi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] \dots\dots\dots(1)$$

- Dimana :
- X(1): Indeks harapan hidup
 - X(2): Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah).
 - X(3): Indeks paritas daya beli.

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

$$Indeks X (i) = \frac{X(i) - X(i) \min}{X (i) \max - X(i) \min} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana X(i) : Indikator ke-i (i=1,2,3)
 X(i)maks : Nilai maksimum X(i)
 X(i)min : Nilai minimum X(i)

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
yang digunakan dalam penghitungan

Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan
	Maksimum	Minimum	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan (Pendekatan terhadap daya beli)	732.720	360.000 (1999)	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber : *Indonesia Human Development Report 2001-Towards a new consensus (Democracy and Human Development in Indonesia)-BPS, BAPPENAS, UNDP*

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, hingga saat ini

masih digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan (*longevity*) yang diwakili dengan *usia harapan hidup (life expectancy at Age 0; e₀)*, komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu *angka melek huruf (literacy rate/ Lit)* dan *rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/ MYS)* dan indikator hidup layak (*decent living*) atau kemakmuran yang diwakili oleh *purchasing power parity/ daya beli*. Berhubung data PPP sulit diperoleh maka digunakan PDRB riil perkapita.

2.1.1. Angka Harapan Hidup (e_0)

Seperti yang telah disebutkan dalam BPS-UNDP (1996: 8) bahwa sebenarnya agak “berlebihan” mengatakan variabel e_0 dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat”, mengingat angka morbiditas tampaknya lebih valid dalam mengukur “hidup sehat”. Meskipun demikian, karena keterbatasan data dan hanya sedikit negara yang memiliki data morbiditas yang dapat dipercaya maka variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan.

Penggunaan angka harapan hidup didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan resultante dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

2.1.2. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan data Susenas Kor, dalam tulisan ini menggunakan penduduk 10 tahun ke atas. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Penghitungan indikator rata-rata lama sekolah dilakukan dengan cara penghitungan tidak langsung. Langkah pertama adalah memberikan bobot variabel “ijazah/STTB tertinggi” yang dimiliki sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3. Langkah selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya. Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MYS = \frac{\sum_{i=1}^{10} f_i * LSi}{\sum_{i=1}^{10} f_i}$$

- Dimana :
- MYS* : rata-rata lama sekolah (dalam tahun)
 - Fi* : frekuensi penduduk yang berumur 10 thn ke atas untuk jenjang pendidikan i..
 - Si* : skor masing-masing jenjang pendidikan i.
 - LSi* : 0 (bila tidak/belum pernah sekolah)
 - LSi* : Si (bila tamat)
 - LSi* : Si + kelas yang diduduki – 1 (bila masih bersekolah dan pernah tamat)
 - LSi* : kelas yang diduduki – 1 (bila jenjang yg diduduki SD/SR/MI/Sederajat)
 - I* : jenjang pendidikan (1,2,3, ...,10):

Tabel 2.2.
Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk
Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Jenjang Pendidikan	Skor
(1)	(2)
Tidak punya	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I/II	14
Diploma III/Sarjana Muda	15
Diploma IV/S1	16
S2	18
S3	21

2.1.3. Purchasing Power Parity (PPP)

Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai Purchasing Power Parity (PPP) yang digunakan dalam laporan beberapa tahun lalu adalah PDRB riil perkapita yang telah disesuaikan (*adjusted real GRDP per capita*), seperti juga yang digunakan oleh UNDP. Berbeda dengan laporan IPM yang sekarang telah menggunakan komponen yang lebih baik yaitu dengan menggunakan konsumsi riil perkapita dari hasil Susenas Modul Konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP. Dengan menggunakan PDRB riil perkapita berarti mengasumsikan bahwa hasil dari PDRB daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk wilayah ini.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil, yang dianggap kemampuan daya beli (U), secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$ \begin{aligned} U(y) &= y' \\ &= y' + 2(y-y')^{(1/2)} \\ &= y' + 2(y-y')^{(1/2)} + 3(y-2y')^{(1/3)} \\ &= y' + 2(y-y')^{(1/2)} + 3(y-2y')^{(1/3)} + 4(y-3y')^{(1/4)} \\ &\text{dst.} \end{aligned} $	<p>jika $y \leq y'$ jika $y' < y \leq 2y'$ jika $2y' < y \leq 3y'$ jika $3y' < y \leq 4y'$</p>
--	--

Dimana:

y = PDRB riil per kapita
y' = threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan (Garis Kemiskinan).

2.2. Sumber Data

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah yang disajikan dalam tulisan ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2006 dan Susenas 2010). Selain data survei tersebut sebagai pembanding juga disajikan data Sensus Penduduk.

Yang diungkap dalam penyajian laporan ini sebagai indikator atau data basis adalah data yang dihasilkan dari kor Susenas 2006 atau 2010 terutama yang berkaitan dengan indikator pendukung, seperti indikator kependudukan, indikator bidang kesehatan dan pendidikan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Letak Geografis

Kota Makassar terletak di bagian Selatan Sulawesi Selatan dengan posisi 119° 24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan. sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kota Makassar adalah sekitar 175,77 km² yang terdiri dari 14 kecamatan dengan 143 desa/kelurahan, 970 RW dan 4.789 RT.

Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Maritin Paotere, pada tahun 2010 secara rata-rata kelembaban udara rata-rata 82,7 persen, suhu udara sekitar 25,0°C - 31,9°C dan rata-rata kecepatan angin 4,0 knot.

3.2. Kependudukan

Penduduk Kota Makassar berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2007 sekitar 1.235.239 jiwa yang terdiri dari 618.233 laki-laki dan 617.006 perempuan. Angka tersebut meningkat menjadi 1.339.374 jiwa pada tahun 2010 dengan komposisi

661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Sex ratio Kota Makassar pada tahun 2007 sekitar 100,20 yang berarti terdapat lebih 100 orang laki-laki diantara 100 perempuan, kemudian pada tahun 2010 turun menjadi 97,55, ini berarti terdapat 97 lebih orang laki-laki diantara 100 perempuan. Adanya penurunan sex ratio ini diduga salah satu penyebabnya adalah karena Kota Makassar sebagai salah satu kota yang menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih banyak dikawasan timur Indonesia dan juga lapangan pekerjaan sehingga menjadi salah satu kota tujuan kaum perempuan yang menuntut ilmu pengetahuan dan mencari pekerjaan.

Hasil Sensus Penduduk (SP) laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar selama kurun waktu 1980-1990 (1,74 persen pertahun), kemudian pada kurun waktu 1990-2000 turun menjadi 1,32 persen pertahun dan tahun 2000-2010 menjadi 1,87 persen. Sementara dalam kurun waktu 2007-2010 tumbuh sekitar 2,73 persen per tahun. Pertumbuhan yang tinggi disebabkan karena daerah ini merupakan satu kota pusat pendidikan dan tempat mencari lapangan pekerjaan di kawasan timur indonesia . Pertumbuhan penduduk yang tinggi oleh banyak pihak merupakan suatu hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka dipandang bahwa pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah.

Pertumbuhan penduduk yang positif akan memperluas lahan hunian sehingga menambah kepadatan penduduk Kota Makassar. Pada tahun 2007 kepadatan penduduk Kota Makassar adalah 7.028 orang/km² kemudian pada tahun 2010 menjadi 7.620 orang/km², suatu peningkatan yang cukup besar. Peningkatan kepadatan penduduk yang cepat tentunya akan membebani pemerintah dalam penyediaan berbagai macam fasilitas. Jika hal tersebut diikuti dengan peningkatan potensi penduduk, terutama dari segi ekonomi, maka peningkatan kepadatan penduduk sedikit akan mengurangi beban pemerintah.

Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2007 adalah sekitar 324.497 orang, penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 869.732 orang yang disebut dengan usia produktif dan mereka yang berusia lanjut (65 tahun lebih) sekitar 40.886 orang. Setelah dihitung maka angka beban tanggungan adalah sebesar 42,00 atau secara hipotesis bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Makassar pada tahun 2007 menanggung beban ekonomi sekitar 42 orang usia tidak produktif. Sementara tahun 2010 jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) adalah sekitar 375.461 orang, penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 918.968 orang yang disebut dengan usia produktif dan mereka yang berusia lanjut (65 tahun lebih) sekitar 44.945 orang. Setelah dihitung maka angka beban tanggungan adalah sebesar 45,75 atau secara hipotesis bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Makassar pada tahun 2010

menanggung beban ekonomi sekitar 46 orang usia tidak produktif. Angka beban tanggungan ini meningkat dibanding tahun 2007.

3.3. Ekonomi (PDRB)

Potret potensi ekonomi secara keseluruhan sebenarnya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka ini juga dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduknya, yaitu dengan membagi PDRB dengan penduduk pertengahan tahun, atau sering disebut pendapatan perkapita. Akan tetapi pendapatan perkapita masih merupakan ukuran secara umum/kasar dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu belum sepenuhnya dapat mengukur taraf kesejahteraan masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga berlaku Kota Makassar pada tahun 2006 sebesar 18.165.876,33 (jutaan rupiah) meningkat menjadi 37.007.451,94 (jutaan rupiah) pada tahun 2010 atau tumbuh dengan rata-rata 18,70 persen pertahun selama periode tersebut. Sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2010 adalah sektor perdagangan yaitu sekitar 29,08 persen, yang sebelumnya yaitu tahun 2006 andilnya sekitar 28,21 persen terhadap PDRB.

Seperti kita ketahui bahwa PDRB setelah dikurangi faktor produksi dan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun

menghasilkan PDRB perkapita. PDRB perkapita Kota Makassar berdasarkan harga berlaku tahun 2006 sebesar 14.846.982 rupiah kemudian meningkat menjadi 27.630.409 rupiah pada tahun 2010.

Tabel . 3.1.
PDRB Perkapita Kota Makassar Tahun 2006-2010

Tahun	Harga Berlaku (juta Rp)	Pertumbuhan (persen)	Harga Konstan (juta Rp)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006	14.846.982	13,37	9.269.700	6,21
2007	16.874.656	13,39	9.926.298	7,08
2008	20.947.627	23,22	10.809.845	8,90
2009	24.758.131	19,07	11.718.896	8,41
2010*)	27.630.409	11,60	12.134.363	3,55
Rata-rata		16,13		6,83

Sumber : BPS Kota Makassar

*) Angka sementara

Namun disadari pula bahwa angka itu masih dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro suatu wilayah. Dengan adanya pengaruh ekonomi tersebut maka digunakan PDRB riil perkapita (PDRB berdasarkan harga konstan 2000), supaya tidak dipengaruhi inflasi. PDRB riil perkapita pada tahun 2006 Kota Makassar sebesar 9.269.700 rupiah dan meningkat menjadi 12.134.363 rupiah pada tahun 2010.

B A B IV

POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan diberbagai bidang kehidupan terus dilakukan sebagai wujud dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satu diantaranya adalah seberapa besar manfaat yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menentukan keberhasilan suatu pembangunan di daerah perlu dilakukan suatu pengukuran keinerja. Kinerja pembangunan yang dimaksud adalah kinerja pembangunan manusia yang disajikan dalam satu indikator komposit (angka tunggal) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

Untuk menentukan besarnya IPM suatu daerah, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM. Komponen-komponen tersebut adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks paritas daya beli.

4.1. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

4.1.1. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup (eo) yang diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan. Angka harapan hidup Kota Makassar dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan kemajuan pembangunan dibidang kesehatan terus mengalami perbaikan. Meningkatnya Angka Harapan Hidup akan berimplikasi pula pada peningkatan indeks kesehatan. Pada tahun 2006 indeks kesehatan Kota Makassar tercatat sekitar 78,67 meningkat menjadi sekitar 80,00 tahun 2009. Begitu pula tahun 2010 mengalami peningkatan sehingga menjadi sekitar 80,98.

4.1.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan di Kota Makassar mengalami peningkatan, yaitu dari 87,53 tahun 2006 menjadi 88,00 pada tahun 2009 dan tahun 2010 juga meningkat menjadi 88,57. Peningkatan indeks pendidikan disebabkan oleh komponen angka melek huruf mengalami peningkatan dari 96,25 persen pada tahun 2006 menjadi 96,70 persen pada tahun 2009. Kemudian tahun 2010 juga mengalami peningkatan menjadi 96,79.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 10,5 tahun pada tahun 2006 menjadi 10,60 tahun pada tahun 2009 dan tahun 2010 masih mengalami peningkatan menjadi 10,82 tahun.

4.1.3. Indeks Paritas Daya Beli

Komponen PPP (Purchasing Power Parity) atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, dalam laporan ini digunakan PDRB riil perkapita. Penggunaan PDRB riil perkapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi susenas) belum sampai estimasi kabupaten/kota. Namun dengan asumsi bahwa PDRB Kota Makassar dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat pendapatan sebagai indikator standar hidup layak. Daya beli penduduk Kota Makassar pada tahun 2006 sekitar Rp 638.920 meningkat menjadi sekitar Rp 646.960 pada tahun 2009. Demikian juga tahun 2010 tetap mengalami peningkatan menjadi Rp.649.120

Selanjutnya Indeks PPP di Kota Makassar sekitar 64,45 pada tahun 2006, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 66,32, demikian juga tahun 2010 menjadi 66,81

4.2. Indeks Pembangunan Manusia

Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya

tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia *secara keseluruhan* dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar pada tahun 2006 sekitar 76,87 kemudian mengalami peningkatan menjadi 77,41 pada tahun 2007. Begitu pula tahun 2009 dan tahun 2010 masing-masing menjadi 78,24 dan 78,79.

Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sebagai IPM sedang, nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM di atas 79 (> 79) digolongkan tinggi. Dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kota Makassar tergolong IPM menengah dan kelihatannya tinggal beberapa langkah lagi akan beralih dan memasuki golongan IPM tinggi.

Kalau dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan, pada tahun 2010 IPM Kota Makassar menempati peringkat pertama yang tertinggi dengan nilai 78,79, kemudian peringkat kedua adalah Kota Pare-Pare dengan nilai IPM 77,78, peringkat ketiga Kota

Palopo dengan nilai IPM 76,55, peringkat keempat Kabupaten Enrekang dengan nilai IPM 74,55. Dari 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, kabupaten yang menempati peringkat terendah IPM-nya adalah Kabupaten Jeneponto dengan nilai IPM 64,92. Untuk melihat besaran IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan peringkatnya dapat dilihat pada tabel lampiran.

<http://makassarkota.bps.go.id>

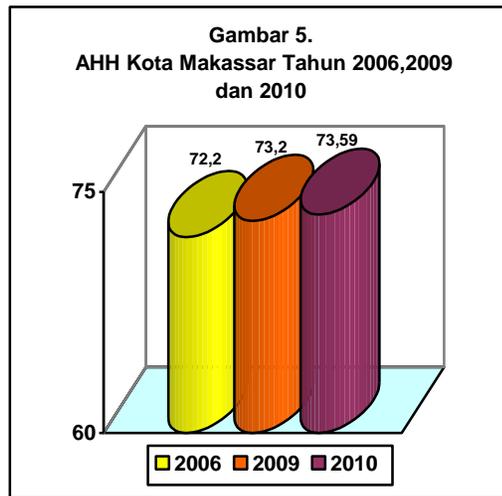
BAB V

KESEHATAN

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti membangun tempat pelayanan kesehatan sampai tingkat pedesaan, penambahan jumlah tenaga kesehatan, peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, penyediaan obat generik yang lebih murah, dan sebagainya. Ini semua dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang baik dengan mudah, murah dan merata. Bahkan pemerintah berupaya dengan menyediakan fasilitas pengobatan secara gratis bagi kalangan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dengan menerbitkan kartu Jamkesmas sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam pengobatan bagi penduduk miskin. Disamping itu kegiatan penyuluhan kesehatan agar keluarga membiasakan diri untuk hidup sehat terus dilakukan. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

5.1 Angka Harapan Hidup

Membbaiknya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Dalam beberapa tahun terakhir ini Angka Harapan Hidup Kota Makassar terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2006 sekitar 72,20 tahun dan meningkat



menjadi 73,20 tahun 2009. Begitu pula tahun 2010 meningkat menjadi 73,59 tahun. Sedangkan AHH Sulawesi Selatan Tahun 2006 sekitar 69,20 tahun dan tahun 2010 menjadi 70,00 tahun. Besar kecilnya AHH dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan)

maupun eksogen (pengaruh dari luar). Khusus untuk variabel eksogen dapat banyak factor diantaranya men-cakup input makanan, upaya kesehatan dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (time lag) tertentu. Pengaruh variabel-variabel tersebut bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain.

5.2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan dan penanggulangan kesehatan masyarakat. Fasilitas yang tersedia tanpa didukung dengan keterampilan

tenaga kesehatan yang memahami tugas dan tanggungjawabnya tentunya akan kurang bermakna, begitu pula sebaliknya tenaga kesehatan yang tersedia dengan keterampilan yang cukup namun tanpa dibarengi dengan fasilitas yang memadai tentu akan mendapatkan hasil yang kurang optimal.

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan jumlah fasilitas dan penambahan tenaga kesehatan.

Pada tahun 2010 Jumlah rumah sakit umum di Kota Makassar baik rumah sakit pemerintah maupun swasta sebanyak 16, rumah sakit jiwa sebanyak 1, rumah sakit bersalin sebanyak 12, rumah sakit khusus sebanyak 1, puskesmas sebanyak 38, puskesmas pembantu sebanyak 44, puskesmas keliling sebanyak 37, dan dokter praktek sebanyak 2.176.

5.4. Status Kesehatan Masyarakat

Data susenas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kota Makassar sekitar 27,43 persen pada tahun 2007, kemudian naik menjadi 29,53 persen dari total penduduk pada tahun 2010. Banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terjadinya perubahan cuaca dan sebagainya. Kalau dilihat dari jenis kelamin, persentase laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan sekitar 28,10

persen dan perempuan sekitar 26,41 persen pada tahun 2007, sementara tahun 2010 laki-laki sebanyak 27,32 persen dan perempuan sebanyak 31,57 persen.

Tabel 5.1.
Persentase Penduduk Yang Mengeluh Sakit Menurut Jenis Kelamin
Di Kota Makassar Tahun 2007 dan 2010

Jenis Kelamin	2007		2010	
	Yang Mengeluh (%)	Penduduk	Yang Mengeluh (%)	Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	28,10	173.723	27,32	176.391
Perempuan	26,41	162.951	31,57	396.548
Lk-lk+Perp	27,43	336.674	29,53	396.548

Sumber: Susenas 2007 dan 2010

BAB VI PENDIDIKAN

Perhatian pemerintah terhadap peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan tergambar dari semakin meningkatnya persentase alokasi dana APBN untuk bidang pendidikan pada beberapa tahun terakhir ini. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Berbagai program pemerintah telah dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, adanya pendidikan gratis untuk tingkat sekolah tertentu, penambahan jumlah tenaga pengajar dan peningkatan kesejahteraan pengajar melalui sertifikasi.

6.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan jumlah tenaga pengajar yang berkualitas serta biaya pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan tiga hal yang memegang peranan penting terhadap maju mundurnya dunia pendidikan

Sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai di kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu harapan pemerintah kota Makassar agar masyarakatnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas.

Untuk melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah murid dengan guru. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan namun semakin kecil angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula.

Di Kota Makassar pada kurun waktu 2006-2010 rasio murid terhadap guru SD, SLTP dan SLTA memberikan indikasi adanya perbaikan. Pada tahun 2006 rasio murid terhadap guru SD sebanyak 24 murid setiap guru, ini berarti ada sekitar 24 murid yang harus ditangani oleh seorang guru SD pada sebuah sekolah tempat dia mengajar. Pada tahun 2009 berubah menjadi 22 murid setiap guru dan tahun 2010 kembali menjadi 24 murid setiap guru.

Untuk tingkat SLTP rasio murid terhadap guru pada tahun 2006 adalah 14 murid setiap guru dan tahun 2010 tetap menjadi 14 murid setiap guru.

Sementara untuk tingkat SLTA rasio murid terhadap guru mengalami perbaikan yang cukup berarti, artinya beban guru berkurang, dimana tahun 2008 rasio murid terhadap guru SLTA adalah 9 murid, turun menjadi 6 murid pada tahun 2010. Hal ini terjadi karena adanya penambahan guru SLTA baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

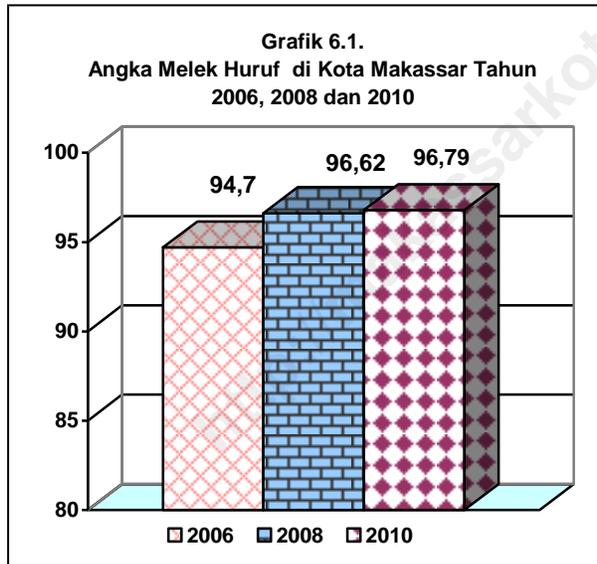
Untuk melihat rata-rata banyaknya murid yang bersekolah dalam setiap jenjang pendidikan dapat diketahui dengan membandingkan jumlah murid terhadap sekolah. Salah satu kegunaannya adalah untuk melihat

apakah sudah waktunya pemerintah atau pihak swasta membangun sekolah baru pada suatu tempat atau belum.

Rasio murid-sekolah SD di Kota Makassar pada tahun 2006 sekitar 270 murid per sekolah, kemudian naik menjadi 320 murid persekolah pada tahun 2010. Demikian juga rasio siswa SLTP mengalami peningkatan dari 339 siswa per sekolah pada tahun 2006 menjadi 341 siswa pada tahun 2010. Sementara itu, rasio siswa SLTA terjadi penurunan dari 337 pada tahun 2006 menjadi 307 siswa pada tahun 2010.

6.2. Tingkat Pendidikan

6.2.1. Angka Melek Huruf.



Angka Melek Huruf (AMH) Kota Makassar terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui karena pada tahun 2006 penduduk Kota Makassar yang bisa baca tulis sekitar 94,70 persen dari total penduduk umur 10 tahun ke atas, kemudian pada tahun 2008 naik

menjadi sekitar 96,62 persen. Demikian juga tahun 2010 mengalami peningkatan sehingga menjadi 96,79 persen.

6.2.2. Rata–Rata Lama Sekolah

Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Makassar pada tahun 2006 sekitar 10,50 tahun kemudian tahun 2008 tetap 10,50, sementara tahun 2010 meningkat menjadi 10,82 tahun. Dengan melihat angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2006 tingkat pendidikan penduduk rata-rata sudah menyelesaikan pendidikan pada sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan bahkan setingkat dengan kelas 2 SLTA dan pada tahun 2010 sudah hampir setingkat dengan kelas tiga SLTA. Dengan melihat perkembangan tersebut mudah-mudahan dalam beberapa tahun yang akan datang rata-rata lama sekolah telah mencapai 12 tahun atau setara dengan tamat SLTA. Angka rata-rata lama sekolah kota Makassar merupakan yang tertinggi di Sulawesi Selatan.

6.2.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki suatu daerah antara lain dapat dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduknya. Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2007 dan tahun 2010 penduduk Kota Makassar umur 10 tahun ke atas yang mempunyai ijazah tertinggi yang dimiliki mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2007 penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak punya

Tabel. 6.1.
 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas
 Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki
 Di Kota Makassar Tahun 2007 dan 2010

Ijasah Tertinggi yang Dimilki	2007	2010
(1)	(2)	(3)
Tidak punya ijazah	11,40	13,97
SD	16,18	16,22
SLTP/Sederajat	17,47	15,66
SMU/ Sederajat	35,24	37,52
Perguruan Tinggi	14,75	16,64

Sumber : Susenas 2007 dan 2010

ijazah sekitar 11,40 persen, kemudian pada tahun 2010 naik menjadi 13,97 persen. Sementara itu penduduk yang mempunyai ijazah SD pada tahun 2007 sekitar 16,18 persen kemudian naik menjadi 16,22 persen tahun 2010. Untuk tingkat SMU/ sederajat penduduk yang mempunyai ijazah sekitar 35,24 persen dan naik menjadi 37,52 persen

pada tahun 2010. Kemudian untuk perguruan tinggi penduduk yang mempunyai ijazah sekitar 14,75 persen dan naik menjadi 16,64 persen pada tahun 2010. Kalau dilihat secara umum terjadi peningkatan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk, dimana tahun 2007 jumlah penduduk yang mempunyai ijazah SLTP ke atas adalah sekitar 67,46 persen, meningkat menjadi 69,82 persen tahun 2010. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran penduduk untuk menamatkan pendidikan yang lebih tinggi.

6.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan antara lain dapat juga dilihat dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS). APS disini adalah persentase penduduk umur tertentu yang masih sekolah terhadap seluruh penduduk usia tersebut.

Tabel 6.2
Angka Partisipasi Sekolah
Menurut Usia Sekolah (7-18 Tahun),
Kota Makassar Tahun 2009 dan 2010

Penduduk Usia Sekolah	2009	2010
(1)	(2)	(3)
7 – 12	96,89	96,49
13 – 15	65,62	87,17
16 – 18	55,64	61,89

Sumber : Susenas 2009 dan 2010

Pada periode 2009-2010 APS untuk usia sekolah dasar di Kota Makassar mengalami penurunan, sementara untuk usia SLTP dan SLTA mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 APS SD (7-12 tahun) sekitar 96,89 turun menjadi sekitar 96,49 persen pada tahun 2010. Kemudian APS Sekolah

Lanjutan Pertama meningkat dari 65,62 persen tahun 2009 menjadi 87,17 persen tahun 2010. Selajutnya APS Sekolah Lanjutan Atas dimana tahun 2009 sekitar 55,64 persen menjadi 61,89 persen tahun 2010.

**Indikator Kependudukan Kota Makassar
Tahun 2009 dan 2010**

No.	Indikator	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penduduk - Laki-laki - Perempuan	1.272.349 610.270 662.079	1.339.374 661.379 677.995
2.	Sex Ratio	92,17	97,55
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk - 1990 – 2000 - 2000 - 2010		1,71 1,87
4.	Kepadatan Penduduk (pddk/km²)	7.239	7.620
5.	Penduduk menurut kelompok umur - 0 – 14 - 15 – 64 - 65 +	370.799 858.933 42.617	375.461 918.968 44.945
6.	Angka Beban Tanggungan	48,13	45,75
7.	Jumlah Rumahtangga	296.374	306.067
8.	Rata-rata Anggota Rumahtangga	4,29	4,38

Sumber : BPS Kota Makassar

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen IPM
Kota Makassar Tahun 2009 dan 2010**

No.	Indikator	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Angka Harapan Hidup (e0)	73,24	73,59
2.	Angka Melek Huruf	96,68	96,79
..	Rata-rata Lama Sekolah	10,60	10,82
4.	Paritas Daya Beli (PPP) (000.Rp)	646,60	649,12
5.	Indeks kesehatan	80,4	80,98
6.	Indeks Pendidikan	88,0	88,57
7.	Indeks PPP	66,32	66,81
8.	IPM	78,24	78,79

Sumber : BPS Kota Makassar

**Beberapa Indikator Kesehatan Kota Makassar
Tahun 2009 dan 2010**

No.	Indikator	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rumah Sakit Umum	15	16
2.	Rumah Sakit jiwa	1	1
3.	Rumah Sakit Bersalin	12	12
4.	Rumah Sakit Khusus lainnya	1	1
5.	Puskesmas	37	38
6.	Puskesmas Pembantu	45	44
7.	Puskesmas Keliling	37	37
8.	Dokter Praktek	2.176	2.176

Sumber : BPS Kota Makassar

**Beberapa Indikator Pendidikan Kota Makassar
Tahun 2009 dan 2010**

No.	Indikator	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Sekolah :		
	- SD	459	452
	- SLTP	171	179
	- SLTA	112	116
2.	Jumlah Murid:		
	- SD	145.749	144.499
	- SLTP	59.101	61.107
	- SLTA	45.277	35.567
3.	Jumlah Guru :		
	- SD	6.542	6.033
	- SLTP	4.630	4.268
	- SLTA	4.817	5.595
4.	Rasio Murid-Guru :		
	- SD	22	24
	- SLTP	13	14
	- SLTA	13	6
5.	Rasio Murid Sekolah :		
	- SD	318	320
	- SLTP	346	341
	- SLTA	583	307

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar

**Beberapa Indikator Pendidikan Kota Makassar
Tahun 2009 dan 2010**

No.	Indikator	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Angka Meleh Huruf	96,68	96,68
2.	Pendidikan yang Ditamatkan		
	- Tdk punya ijazah	12,88	12,88
	- SD	18,43	18,43
	- SLTP/Sederajat	17,00	17,00
	- SMU/ Sederajat	34,74	34,74
	- Perguruan Tinggi	14,30	14,30
3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) :		
	- 7 – 12	96,89	96,89
	- 13 – 15	85,62	85,62
	- 16 – 18	55,64	55,64

Sumber : BPS Kota Makassar

PDRB Perkapita Kota Makassar Tahun 2006-2010

Tahun	Harga Berlaku (juta Rp)	Pertumbuhan (persen)	Harga Konstan (juta Rp)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006	14.846.982	13,37	9.269.700	6,21
2007	16.874.656	13,39	9.926.298	7,08
2008	20.947.627	23,22	10.809.845	8,90
2009	24.758.131	19,07	11.718.896	8,41
2010	27.630.409	11,60	12.134.363	3,55
Rata-rata		16,13		6,83

Sumber : BPS Kota Makassar

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Propinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009-2010**

No.	Kab/Kota	IPM		Peringkat IPM	
		2009	2010	2009	2010
1.	Selayar	68,86	69,34	22	22
2.	Bulukumba	70,55	71,19	12	12
3.	Bantaeng	69,40	70,10	18	18
4.	Jeneponto	64,54	64,92	24	24
5.	Takalar	68,04	68,62	23	23
6.	Gowa	70,00	70,67	15	15
7.	Sinjai	69,21	69,53	19	20
8.	Maros	70,55	71,12	13	13
9.	Pangkajene Kepulauan	69,07	69,43	20	21
10.	Barru	70,30	70,86	14	14
11.	Bone	69,63	70,17	16	17
12.	Soppeng	71,26	71,89	11	10
13.	Wajo	69,44	70,22	17	16
14.	Sidenreng Rappang	72,06	72,37	9	9
15.	Pinrang	72,61	73,21	7	7
16.	Enrekang	74,19	74,55	4	4
17.	Luwu	73,59	73,98	6	6
18.	Tana Toraja	71,39	71,84	10	11
19.	Luwu Utara	73,65	74,32	5	5
20.	Luwu Timur	72,29	72,79	8	8
21.	Toraja Utara	68,92	69,56	21	19
22.	Kota Makassar	78,28	78,79	1	1
23.	Kota Pare-Pare	77,45	77,78	2	2
24.	Kota Palopo	76,11	76,55	3	3
	SULAWESI SELATAN	70,94	71,62	20	19